Inklusivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Ambon (Studi Kasus: Ruang Terbuka Publik Pantai Wainitu
dan Ruang Terbuka Publik Pantai Amahusu)
Edwin Excell Efruan, Atrida Hadianti, ST, M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Inklusivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Ambon (Studi Kasus : Ruang Terbuka Publik Pantai Wainitu dan Ruang Terbuka Publik Pantai Amahusu)

INTISARI

Kota Ambon sebagai kota kepulauan memiliki karakteristik geografis berbukit yang menyebabkan keterbatasan ketersediaan lahan datar, sehingga perkembangan kotanya diarahkan ke kawasan pesisir, termasuk dalam penyediaan ruang terbuka publik (RTP). Penelitian ini mengambil dua lokasi kajian, yaitu RTP Pantai Wainitu dan RTP Pantai Amahusu. Sejalan dengan prinsip *Right to the City*, Tujuan 11 *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta Visi RPJMD Kota Ambon yang menekankan pembangunan kota yang inklusif termasuk ruang publik, penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengukur tingkat inklusivitas ruang terbuka publik di kedua lokasi, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap inklusivitas ruang terbuka publik.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden dari 5 kecamatan di Kota Ambon dengan teknik *Proportional Purposive Sampling*, di mana populasi sampel dibagi secara proporsional di 5 kecamatan di Kota Ambon, dengan kriteria responden harus pernah mengunjungi kedua lokasi RTP yang diteliti. Fokus kajian dibagi menjadi aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mengukur tingkat inklusivitas ruang terbuka publik melalui analisis tiga variabel akses dengan skala Likert yang diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Aspek eksternal dikaji melalui perspektif keadilan spasial, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi inklusivitas, dilakukan uji Mann-Whitney U dan korelasi Spearman menggunakan SPSS guna melihat hubungan antara delapan variabel dari aspek internal dan eksternal, yaitu fasilitas kalangan khusus, fasilitas ramah anak, rasa aman, pencahayaan, keterjangkauan, frekuensi kunjungan, jenis kelamin, dan usia, terhadap skor inklusivitas yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas ruang terbuka publik *waterfront* di Kota Ambon secara umum berada pada kategori tinggi, namun di balik nilai agregat tersebut, kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia masih termarjinalkan dari akses yang setara. Hasil uji korelasi menunjukkan enam dari delapan variabel berhubungan signifikan dengan persepsi inklusivitas di kedua lokasi: fasilitas kalangan khusus, fasilitas ramah anak, rasa aman, dan pencahayaan dengan kekuatan hubungan sedang, serta keterjangkauan dan usia dengan kekuatan hubungan lebih lemah, sementara frekuensi kunjungan dan jenis kelamin tidak signifikan. Secara khusus, ditemukan bahwa kelompok lansia yang paling rutin mengunjungi RTP justru memberikan penilaian inklusivitas paling rendah, sementara pengunjung dari jarak jauh yang datang temporer cenderung menilai ruang ini lebih inklusif, menegaskan bahwa nilai agregat yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan inklusivitas bagi seluruh penggunanya. Temuan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan inklusivitas ruang terbuka publik di Kota Ambon.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Publik, Inklusivitas, *Right to the City*, Keadilan Spasial, Kota Ambon

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Inklusivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Ambon (Studi Kasus: Ruang Terbuka Publik Pantai Wainitu
dan Ruang Terbuka Publik Pantai Amahusu)**
Edwin Excell Efruan, Atrida Hadianti, ST, M.Sc., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Inclusivity of Public Open Spaces in Ambon City (A Case Study of Wainitu Beach and Amahusu Beach)

ABSTRACT

Ambon City, as an archipelagic city, is characterized by hilly terrain that limits the availability of flat land, directing urban development toward coastal areas, including the provision of public open spaces. This study examines two locations, Wainitu Beach Public Open Space and Amahusu Beach Public Open Space. In alignment with the Right to the City principle, Goal 11 of the Sustainable Development Goals (SDGs), and the vision of the Ambon City Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) which emphasizes inclusive urban development, including public spaces. This study aims to, (1) measure the level of inclusivity of public open spaces at both locations, and (2) identify the factors associated with public perception of public open space inclusivity.

This study employs a descriptive quantitative deductive method. Data were collected through questionnaires distributed to respondents from 5 sub-districts in Ambon City using a Proportional Purposive Sampling technique, in which the sample population was proportionally divided across the 5 sub-districts in Ambon City, with respondents required to have visited both POS locations under study. The analysis was organized into internal and external aspects. The internal aspect measured the level of public open space inclusivity through three access variables analyzed using a Likert scale, classified into four categories, namely very low, low, high, and very high. The external aspect was examined through a spatial justice perspective. To identify the factors associated with inclusivity perception, a Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis were conducted using SPSS to examine the correlations among eight variables from the internal and external aspects, namely facilities for people with special needs, child-friendly facilities, sense of safety, lighting, accessibility, visit frequency, gender, and age, with the obtained inclusivity scores.

The results showed that the inclusivity level of waterfront public open spaces in Ambon City was generally high, yet beneath this aggregate score, vulnerable groups such as children, persons with disabilities, and the elderly remain marginalized from equal access. Correlation tests revealed that six of the eight variables were significantly associated with inclusivity perception at both locations: facilities for people with special needs, child-friendly facilities, sense of safety, and lighting showed moderate correlation strength, while accessibility and age were significant with weaker correlations, whereas visit frequency and gender showed no significant association. Notably, the elderly, who visit the POS most frequently, gave the lowest inclusivity ratings, while distant visitors who visit temporarily tended to rate the spaces as more inclusive, confirming that a high aggregate score does not fully reflect inclusivity for all users. These findings are expected to serve as a basis for more comprehensive policy recommendations to enhance the inclusivity of public open spaces in Ambon City

Keywords: *Public Open Space, Inclusivity, Right to the City, Spatial Justice, Ambon City*